

Jejak Pengaruh Kebijakan Politik Pan-Islamisme Sultan Abdul Hamid II (1876-1909 M) di Wilayah Terjajah Umat Muslim Dunia

Bahrudin Lazuardi¹, Iswan Karim², Muhammad Syamsul Munir³

^{1,2,3}Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

bahrudinlazuardi@gmail.com

History:

Submitted: 24-06-2026

Revised: 11-07-2026

Accepted: 11-07-2026

Keyword:

Pan-Islamism, Sultan Abdul Hamid II, Colonized Territories, Movement Transformation

Kata Kunci:

Pan-Islamisme, Sultan Abdul Hamid II, Wilayah Terjajah, Transformasi Gerakan



Copyright © 2026 by Riset.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

<https://doi.org/10.66914/riset>

Abstract

This study explains in depth the traces of the influence of the Pan-Islamist political policy of Sultan Abdul Hamid II (1876–1909 AD) in the colonized regions of the Muslim world and its transformation until the contemporary era. There are four main points in this study, namely 1) The background to the birth of the Pan-Islamist policy was due to the urgent conditions of the domestic and external politics of Ottoman Turkey 2) The conceptual differences of Pan-Islamism between Jamaluddin al-Afghani and Sultan Abdul Hamid II; 3) The process and tactical strategies of spreading the Pan-Islamist movement to the colonized regions; and 4) Traces of influence and transformation of organizations born from this movement until today. This study uses a comprehensive historical research method, including the stages of data collection (heuristics), source criticism (verification), interpretation (interpretation), and writing history (historiography). The theories applied include the theory of asymmetric political influence to reveal the impact of Ottoman external policies, as well as the theory of historical continuity to analyze the bridge of transformation of past movements to the modern era. The results of this study indicate that the Pan-Islamist policy, cleverly implemented by Sultan Abdul Hamid II, succeeded in becoming an asymmetric weapon that secured imperial sovereignty while simultaneously igniting a massive transnational anti-colonial political consciousness in South Asia, the Dutch East Indies, North Africa, and Central Asia. Furthermore, this study demonstrates that the impact of this movement did not disappear after the collapse of the Ottoman Empire in 1924, but instead underwent historical changes that resulted in the establishment of various major organizations (such as the Khilafat Movement, Sarekat Islam, NU, Muhammadiyah, AUMA, and Jadidism) whose institutional, ideological, and spirit-based global humanitarian diplomacy persist and can be felt even in the modern era.

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan secara mendalam mengenai jejak pengaruh kebijakan politik Pan-Islamisme Sultan Abdul Hamid II (1876–1909 M) di wilayah terjajah umat Muslim dunia serta transformasinya hingga era kontemporer. Terdapat empat poin utama dalam penelitian ini yaitu 1) Latar belakang lahirnya kebijakan Pan-Islamisme adalah karena kondisi mendesak politik domestik dan eksternal Turki Ottoman 2) Perbedaan konseptual Pan-Islamisme antara Jamaluddin al-Afghani dan Sultan Abdul Hamid II; 3) Proses dan strategi taktis penyebaran gerakan Pan-Islamisme ke wilayah terjajah; serta 4) Jejak pengaruh dan transformasi organisasi yang lahir dari gerakan ini hingga zaman sekarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang menyeluruh, meliputi tahapan pengumpulan data (heuristik), kritik sumber (verifikasi), penafsiran (interpretasi), dan penulisan sejarah (historiografi). Teori yang diaplikasikan meliputi teori pengaruh politik asimetris untuk mengungkap dampak kebijakan eksternal Ottoman, serta teori kontinuitas sejarah untuk menganalisis jembatan transformasi gerakan masa lalu ke era modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pan-Islamisme yang diusung secara cerdas oleh Sultan Abdul Hamid II berhasil menjadi senjata asimetris yang mengamankan kedaulatan kekaisaran, sekaligus menyulut kesadaran politik anti-kolonial transnasional yang masif di Asia Selatan, Hindia Belanda, Afrika Utara, dan Asia Tengah. Lebih dalam lagi, studi ini menunjukkan bahwa dampak dari pergerakan ini tidak hilang setelah runtuhnya Kekaisaran Ottoman pada tahun 1924, tetapi justru mengalami perubahan secara historis yang menghasilkan berdirinya berbagai organisasi besar (seperti Gerakan Khilafat, Sarekat Islam, NU, Muhammadiyah, AUMA, dan Jadidisme) yang jejak institusional, ideologis, dan spirit diplomasi kemanusiaan globalnya masih bertahan dan dapat dirasakan hingga era modern saat ini.

PENDAHULUAN

Pada penutupan abad ke-19, Kekaisaran Utsmaniyah menghadapi keadaan yang sangat genting baik di dalam negeri maupun di arena internasional, di mana kekuasaan Sultan Abdul Hamid II terancam oleh berbagai tantangan politik yang besar. Secara internal, stabilitas kesultanan diguncang oleh bangkitnya kelompok oposisi sekuler seperti gerakan Utsmani Muda (*Young Ottomans*) yang menuntut pembatasan kekuasaan sultan melalui konstitusionalisme, serta adanya kecemasan mendalam terhadap potensi kemunculan gerakan "Khalifah Arab" di wilayah Syam dan Mesir yang dapat meruntuhkan legitimasi bangsa Turki selaku pemegang takhta khilafah.¹ Di saat yang sama, tantangan eksternal muncul dari penetrasi imperialisme Barat yang tidak hanya menggerogoti wilayah teritorial Utsmaniyah, melainkan juga membawa doktrin ideologi sekuler dan westernisasi yang mengotori akidah serta merusak alam pikiran kaum Muslim di berbagai wilayah jajahan.² Akibatnya, arus westernisasi dan sekularisasi pasca-era Tanzimat ini mengaburkan kesadaran teologis umat, sehingga menghambat mereka untuk memberikan dukungan penuh kepada Istanbul selaku payung pelindung sekaligus pusat politik umat Islam sedunia.³

Mengingat besarnya ancaman disintegrasi tersebut, Sultan Abdul Hamid II melihat adanya

kesempatan strategis untuk merangkul kembali loyalitas umat Islam global dengan cara membumikan sekaligus merevitalisasi gagasan Pan-Islamisme (Ittihat-i Islam).⁴ Gagasan persatuan transnasional ini pada mulanya digagas dan disuarakan secara vokal oleh pemikir revolusioner seperti Jamaluddin al-Afghani, yang menyerukan rekonstruksi teologi movements demi mengikis sikap pasrah (*fatalistik*) umat Islam dan menyatukan solidaritas lintas mazhab serta geografis.⁵ Meskipun terdapat perbedaan orientasi politik yang mendalam—di mana Al-Afghani menginginkan Pan-Islamisme berbasis demokratisasi sedangkan Sultan menerapkannya secara otokratis demi stabilitas negara—Sultan Abdul Hamid II secara cerdas mengadopsi semangat universal dari ide ini.⁶ Melalui instrumen kebijakan luar negeri yang terstruktur, Sultan memanfaatkan gagasan ini sebagai kekuatan lunak (*soft power*) keagamaan untuk menyambung kembali interaksi dan komunikasi antarulama sedunia yang sempat terputus.⁷

Pentingnya kesatuan umat Islam ini menjadi sangat perlu mengingat daerah-daerah pinggiran yang dikuasai bangsa Barat, seperti Hindia Belanda (Nusantara), India (Asia Selatan), dan Afrika Utara, akan lebih gampang ditaklukkan serta dimanfaatkan penjajah apabila tidak ada ikatan persatuan batin-keagamaan yang menyatukan mereka.⁸ Tanpa adanya sebuah poros persatuan dunia, umat Islam di wilayah-wilayah

¹ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq dkk., "Strategi Politik Pan-Islamisme Sultan Abdul Hamid II (1876-1909 M)," *Advances in Humanities and Contemporary Studies* 5, no. 2 (2024): 162–70, <https://doi.org/10.30880/ahcs.2024.05.02.017>.

² Ahmad Salman Kurniawan dkk., "PENGARUH PAN ISLAMISME BAGI KEKHILAFAHAN TURKI UTSMANI PADA MASA SULTAN ABDUL HAMID II," *Tanjak: Sejarah dan Peradaban Islam* 2, no. 2 (1970): 181–204, <https://doi.org/10.19109/tanjak.v2i2.12864>.

³ Meirison Alizar dan Qasim Muhammadi, "Islamic Sharia and Non-Muslim Citizens in Kanunname During Sultan Abdul Hamid II of the Ottoman Empire," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 27, no. 1 (2019): 37–68, <https://doi.org/10.21580/ws.27.1.3543>.

⁴ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq dkk., "Strategi Politik Pan-Islamisme Sultan Abdul Hamid II (1876-1909 M)."

⁵ Raha Bistara, *TEOLOGI MODERN DAN PAN-ISLAMISME: MENILIK GAGASAN PEMBAHARUAN ISLAM JAMALUDDIN AL-AFGHANI*, 2, no. 1 (2021).

⁶ Andi Saputra, *PAN-ISLAMISME DAN KEBANGKITAN ISLAM: REFLEKSI FILSAFAT SOSIAL-POLITIK JAMALUDDIN AL-AFGHANI*, t.t.

⁷ Fatkhul Wahab, *PEMIKIRAN DAN GERAKAN PEMBAHARUAN POLITIK ISLAM JAMALUDDIN AL AFGHANI*, 2022.

⁸ Arditya Prayogi, "Pan-Islamism and Response to the Collapse of Ottoman Turks in the Dutch East Indies," *Paramita: Historical Studies Journal* 33, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.15294/paramita.v33i1.36343>.

jajahan tersebut akan bergerak secara parsial dan terisolasi, menjadikannya rentan terhadap taktik adu domba (*divide et impera*) kolonial Barat.⁹ Oleh karena itu, gerakan Pan-Islamisme yang berpusat di Istanbul tidak hanya berfungsi sebagai tameng pertahanan guna mempertahankan eksistensi kedaulatan Daulah Utsmaniyah dari keruntuhan, melainkan juga menjadi sebuah wadah kolektif bagi seluruh kaum Muslim sejagat untuk bersatu, menimbun kekuatan kultural, dan membakar semangat perlawanan anti-kolonialisme demi membebaskan diri dari belenggu penjajahan asing.¹

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk meyakinkan keaslian karya tulis ilmiah ini dan agar tidak terjadi kesamaan dan plagiarisme dengan karya tulis ilmiah terdahulu, maka diperlukanlah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah di antara unsur penting dalam sebuah penelitian, karena memiliki kegunaan dalam menjelaskan posisi masalah yang sedang diteliti dengan masalah yang telah diteliti terdahulu, dengan tujuan agar tidak terjadi pengulangan penelitian. Adapun literatur yang akan dijadikan tinjauan pada penelitian ini, yaitu Pertama, skripsi yang ditulis oleh Afifah Alawiyah dengan judul "*Strategi Kebijakan Politik Pan-Islamisme Turki Utsmani Pada Masa Sultan Abdul Hamid II (1876-1909 M)*". Di dalam skripsi ini, penulis membahas mengenai basis pemikiran dan strategi yang digunakan Istanbul dalam menyebarluaskan gagasan Pan-Islamisme, seperti pengiriman utusan keagamaan, pemanfaatan media pers, hingga pembangunan infrastruktur lintas wilayah. Karya ini sangat

membantu penelitian ini dalam memetakan instrumen-instrumen yang digunakan dalam proses perluasan gerakan ke luar wilayah pusat khilafah.

Tinjauan pustaka berikutnya, yaitu sebuah jurnal yang berjudul "*Pan-Islamism and Response to the Collapse of Ottoman Turks in the Dutch East Indies in 1924*" yang ditulis oleh Arditya Prayogi. Di dalam jurnal ini, fokus pembahasan diarahkan pada bagaimana ide-ide Pan-Islamisme yang disebarkan dari Istanbul berhasil menjangkau wilayah periferi yang terjajah, khususnya masyarakat Muslim di Hindia Belanda (Nusantara). Artikel ini mengulas secara mendalam jalur masuknya pengaruh Pan-Islamisme serta besarnya dampak ikatan emosional-keagamaan umat Muslim di wilayah kolonial dalam memandang kedaulatan spiritual Khilafah Utsmaniyah.

Tinjauan pustaka yang ketiga, yaitu jurnal yang ditulis oleh Ahmad Salman Kurniawan dan Nurfitri Hadi dengan judul "*Pengaruh Pan Islamisme Bagi Kekhilafahan Turki Utsmani Pada Masa Sultan Abdul Hamid II*". Jurnal ini menjelaskan bagaimana ide persatuan Islam diadopsi sebagai kebijakan luar negeri resmi negara yang bertransformasi menjadi kekuatan politik global. Penulis dalam jurnal tersebut menjabarkan proses difusi ide ini dalam rangka membendung dominasi imperialisisme Barat serta pengaruh politiknya terhadap eksistensi internal kekhilafahan.

Berdasarkan sejumlah studi yang telah disebutkan, literatur yang tersedia umumnya terpisah dalam menganalisis strategi internal di pusat kekuasaan atau dinamika setelah runtuhnya khilafah di wilayah kolonial tertentu. Belum ditemukan penelitian terdahulu yang secara spesifik mengintegrasikan analisis mengenai bagaimana proses teknis transmisi gerakan Pan-Islamisme ini melakukan penetrasi ke wilayah-wilayah umat Muslim yang terjajah secara umum,

⁹ Fahri Hidayat dan Mujibur Rohman, *MODERNISASI PENDIDIKAN ISLAM DI MINANGKABAU: STUDI TENTANG INTERAKSI DENGAN PAN-ISLAMISME (1909-1945)*, t.t.

¹ Rizka Kusuma Rahmawati, *Studi Historis Kebijakan Luar Negeri Sultan Abdul Hamid II di Daulah 'Utsmaniyah (1876-1909 M)*, no. 1 (2017).

sekaligus menilai pengaruhnya secara bersamaan terhadap keberlangsungan kedaulatan Kekaisaran Ottoman di satu sisi dan dinamika perjuangan umat Muslim di seluruh dunia di sisi lainnya.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sejarah atau metode historis. Menurut Garaghan yang dipetik oleh Wasino dan Endah Sri Hartatik, Metode sejarah adalah sebuah set prinsip sistematis yang sangat membantu dalam mengumpulkan sumber data historis, menilai secara kritis atau menyiasat sumber-sumber, dan membentangkan "ringkasan" (biasanya secara bertulis) dari hasil yang diperoleh.¹ Adapun tahapan dalam penelitian historis, diantaranya. Pertama heuristik, merupakan tahap pengumpulan sumber data yang berhubungan dengan objek yang sedang diteliti seperti proses penyebaran gerakan Pan-Islamisme ke wilayah terjajah. Kedua, kritik sumber merupakan tahap menguji keotentikan untuk memperoleh sumber-sumber data sejarah yang benar-benar dapat digunakan. Ketiga, yaitu penafsiran atau interpretasi sejarah mengenai hubungan kausalitas proses penyebaran gerakan berikut dampaknya, terhadap kedaulatan Utsmaniyah dan khususnya terhadap umat Muslim dunia. Keempat, Historiografi yang merupakan tahap atau proses pencatatan atau pembukuan, penguraian atas hasil dari penelitian sejarah yang sudah dilakukan.¹

²

¹ Alfiani Rhamadani dan Aprilia Triaristina, "PERAN TAMAN SISWA DALAM PEMBENTUKAN RASA NASIONALISME PADA MASA PERGERAKAN NASIONAL," *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah* 19, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.21831/istoria.v19i1.53750>.

¹ Ravico Ravico dkk., "Implementasi Heuristik dalam Penelitian Sejarah Bagi Mahasiswa," *Chronologia* 4, no. 3 (2023): 118–28, <https://doi.org/10.22236/jhe.v4i3.11089>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Awal Mula Munculnya Gagasan Gerakan Pan-Islamisme

Gagasan Pan-Islamisme masa kini muncul sebagai tanggapan defensif yang berbasis intelektual dari komunitas Muslim terhadap serangan agresif imperialisme Barat selama abad ke-19. Sosok kunci yang secara terstruktur mengembangkan ideologi ini adalah Sayyid Jamaluddin al-Afghani (1838–1897), seorang pemikir, orator, dan pejuang politik lintas negara yang menghabiskan hidupnya berpindah-pindah dari satu negara ke negara lainnya, termasuk Afghanistan, India, Mesir, dan Eropa. Al-Afghani menyaksikan secara langsung bagaimana peradaban Islam mengalami dekadensi internal akut di saat kekuatan kolonial seperti Inggris dan Prancis merangsek maju menguasai tanah-tanah kaum Muslim.¹ Faktor utama yang mendorong lahirnya gagasan ini adalah kesadaran bahwa kelemahan politik umat Islam bukan disebabkan oleh ajaran agamanya, melainkan karena perpecahan kultural, kejutan budaya atas kemajuan teknologi Barat, serta absolutisme para penguasa Muslim lokal yang korup.

2. Perbedaan Konsep Pan-Islamisme Al-Afghani dan Sultan Abdul Hamid II

Walaupun keduanya mendukung ide Pan-Islamisme, terdapat perbedaan yang mencolok dalam hal arah dan tujuan akhir antara Jamaluddin al-Afghani dan Sultan Abdul Hamid II. Al-Afghani mengonsepsikan gerakan ini dari bawah ke atas (*bottom-up*) bersifat revolusioner, konstitusional, dan anti-absolutisme penguasa; tujuannya adalah membangkitkan kesadaran massa rakyat untuk melawan kolonialisme sekaligus mereformasi sistem pemerintahan Islam

¹ Arbi Mulya Sirait, "Jamaluddin al-Afghani dan Karir Politikanya," *Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman* 10, no. 2 (2020): 167–82, <https://doi.org/10.33367/ji.v10i2.1291>.

agar lebih demokratis.¹ Sebaliknya, Sultan Abdul Hamid II mengadopsi Pan-Islamisme sebagai instrumen geopolitik dari atas ke bawah (*top-down*) yang bersifat defensif-pragmatis demi mempertahankan stabilitas internal Kekaisaran Turki Ottoman yang sedang sekarat.¹

3. Kondisi Lawan Politik Sultan Abdul Hamid II

Sultan Abdul Hamid II mulai memerintah pada tahun 1876 di tengah situasi krisis yang kompleks yang membahayakan kelangsungan Dinasti Ottoman. Dari dalam negeri, rival politik utama Sultan berasal dari kelompok oposisi sekuler-nasionalis, terutama gerakan Young Ottomans (yang nantinya akan berubah menjadi Young Turks). Kelompok ini menuntut pembatasan kekuasaan Sultan melalui pemberlakuan kembali Konstitusi Kanun-u Esasi 1876 dan menolak sentimentalisme Islam yang diusung Sultan, karena mereka lebih condong pada sekularisme dan nasionalisme ala Barat.¹ Selain itu, korupsi birokrasi, krisis finansial yang membuat keuangan negara disetir oleh lembaga asing (*Duyun-u Umumiye*), serta pemberontakan berbasis etnis-nasionalis di wilayah Balkan (seperti di Bulgaria dan Serbia) menjadi duri dalam doomed yang merongrong legitimasi internal istana Yildiz.

Secara eksternal, Sultan dihadapkan pada "Konser Eropa" yang bernuansa agresif, di mana kekuatan-kekuatan besar dari Barat mengincar daerah-daerah Ottoman yang sering disebut dengan istilah The Eastern Question. Britania Raya (Inggris) menjadi ancaman terbesar setelah secara sepihak menduduki Mesir pada tahun 1882

dan memprovokasi sentimen anti-Turki di kalangan elit Arab. Di sisi lain, Republik Prancis terus merangsek menguasai wilayah Afrika Utara, sementara Kekaisaran Rusia secara konsisten melancarkan agresi militer di wilayah Balkan dan Kaukasus.¹ Menyadari bahwa militer Ottoman tidak lagi mampu menandingi kekuatan teknologi perang Barat, Sultan Abdul Hamid II menggunakan Pan-Islamisme sebagai senjata asimetris: sebuah gertakan politik global yang memanfaatkan populasi Muslim di tanah jajahan Eropa sebagai bom waktu geopolitik.

4. Proses Penyebaran Pan-Islamisme ke Wilayah Terjajah Umat Muslim Dunia

A) Imperium Inggris

Penyebaran Pan-Islamisme di wilayah anak benua Indo-Pakistan dimulai dari rasa kedekatan spiritual masyarakat Muslim di sana terhadap Timur Tengah yang dianggap sebagai pusat suci dan bekas sejarah Islam. Situasi ini semakin diperkuat⁶ saat imperialisme Inggris (British Raj) mulai mengambil alih kekuasaan di India, sehingga sosok Khalifah Ottoman dipilih sebagai lambang pemersatu dalam menjaga identitas keagamaan. Proses awal ini dipelopori oleh tokoh-tokoh ulama dan intelektual, seperti Mawlana Shibli Naumani yang membakar emosi massa melalui puisi kejayaan Islam, serta para ulama Deoband seperti Mawlana Mehmud ul Hasan dan Mawlana Obaidullah Sindhi yang mengorganisasi gerakan bawah tanah. Sarana penyebaran utama di wilayah perkotaan bertumpu pada media massa cetak, seperti koran *Zamindar* dan mingguan *The Afghan*, yang dibaca secara massal di masjid-masjid serta panggung komunitas (*Hujra*) untuk memobilisasi opini publik dan menggalang dana kemanusiaan.¹⁸

¹ Wahab, *PEMIKIRAN DAN GERAKAN PEMBAHARUAN POLITIK ISLAM JAMALUDDIN AL AFGHANI*.

¹ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq dkk., "Strategi Politik Pan-Islamisme Sultan Abdul Hamid II (1876-1909 M)."

¹ Alizar dan Muhammadi, "Islamic Sharia and Non-Muslim Citizens in Kanunname During Sultan Abdul Hamid II of the Ottoman Empire."

¹ Alizar dan Muhammadi, "Islamic Sharia and Non-Muslim Citizens in Kanunname During Sultan Abdul Hamid II of the Ottoman Empire."

¹ K. H. Ansari, "Pan-Islam and the Making of the Early Indian Muslim Socialists," *Modern Asian Studies* 20, no. 3

Memasuki tahap yang lebih ekstrem, pemikiran ini berevolusi menjadi sebuah gerakan perlawanan bersenjata yang intens di daerah perbatasan North West Frontier Province (NWFP). Di area ini, pemimpin agama setempat (Mullah) menjadi pihak utama yang menggerakkan komunitas Pakhtun dengan memanfaatkan isu di luar batas wilayah, seperti keberhasilan Turki menghadapi Yunani, sebagai pemicu jihad. Sarana penyebaran di garis depan tidak lagi sekadar literatur, melainkan melalui khotbah politik yang provokatif di basis-basis militer dan jaringan rahasia, seperti yang tercermin dalam Konspirasi Sutra (*Silk Letters Conspiracy*) yang ditulis di atas saputangan sutra. Melalui kombinasi sarana publikasi perkotaan dan jaringan bawah tanah perbatasan ini, Pan-Islamisme berhasil bertransformasi dari gagasan solidaritas intelektual menjadi aksi konfrontasi militer nyata melawan kolonialisme Inggris.¹

B) Imperium Belanda

Penyebaran pemikiran Pan-Islamisme di daerah Hindia Belanda memiliki dasar yang berasal dari pergerakan jaringan intelektual antara Kairo dan Mekah yang aktif menyebarkan ide-ide pembaruan melalui publikasi al-Manar. Gerakan lintas negara ini pada awalnya menimbulkan kekhawatiran yang signifikan pada pemerintahan kolonial Belanda yang sempat menempatkan pembatasan terhadap ibadah haji, namun akhirnya kebijakan tersebut melonggar berkat rekomendasi dari Snouck Hurgronje yang melihat bahwa ancaman dari Khilafah Utsmaniyah telah mengalami penurunan. Di tengah tekanan politik kolonial tersebut, para tokoh lokal

modernis seperti H.O.S. Cokroaminoto dan Haji Agus Salim mengambil peran sentral dengan mendirikan Central Komite Khilafat pada tahun 1924, serta mengutus delegasi ke Kongres Islam Dunia di Mekah sebagai sarana untuk mengonsolidasikan kekuatan umat secara global.²

Dalam perjalanan waktu, alat untuk menyebarkan ide ini berubah melalui publikasi tulisan dan aktivitas partai politik, khususnya melalui koran Fadjar Asia yang menjadi platform untuk gagasan-gagasan radikal S. M. Kartosuwiryo. Kartosuwiryo mengambil Pan-Islamisme bukan hanya sebagai konsep, tetapi sebagai alat untuk perlawanan politik yang direalisasikan dalam ajaran non-kooperasi teologis yang dikenal dengan istilah "Hijrah". Pasca-runtuhnya Khilafah Utsmaniyah, orientasi gerakan ini bergeser secara ekstrem; persatuan Muslim domestik dijadikan batu loncatan menuju persatuan global melalui proklamasi Negara Islam Indonesia (NII). Gagasan internasionalisasi ini terus disebarluaskan hingga era 1950-an melalui penunjukan diplomat luar negeri seperti Hasan Tiro, dengan visi membentuk federasi dunia bernama Dewan Khalifatullah Fil'ardi²

C) Imperium Prancis

Penyebaran Pan-Islamisme di area yang dikuasai oleh Imperium Prancis, terutama di bagian Afrika Utara seperti Tunisia dan Aljazair, serta wilayah-

(1986): 509–37, <https://doi.org/10.1017/S0026749X00007848>.

¹ Prayogi, "Pan-Islamism and Response to the Collapse of Ottoman Turks in the Dutch East Indies."

² Hidayat dan Rohman, *MODERNISASI PENDIDIKAN ISLAM DI MINANGKABAU: STUDI TENTANG INTERAKSI DENGAN PAN-ISLAMISME (1909-1945)*.

² Chiara Formichi, "Pan-Islam and Religious Nationalism: The Case of Kartosuwiryo and Negara Islam Indonesia," *The Muslim World* 99, no. 1 (2009): 23.

wilayah pendukung seperti Mesir, dimulai pada tahun 1880-an sebagai respons global untuk menanggulangi taktik ekspansi dan strategi pembagian (divide et impera) yang diterapkan oleh Prancis. Gerakan perlawanan berbasis keagamaan ini sangat besar sehingga mendorong seorang jurnalis Prancis, Gabriel Charmes, untuk menciptakan istilah "Pan-Islamisme" setelah ia mengamati pergerakan opini masyarakat Muslim setelah Prancis menduduki Tunisia. Gerakan persatuan transnasional ini dikomandoi langsung oleh Sultan Abdul Hamid II dari Istanbul, yang dalam pelaksanaannya menggerakkan jajaran ulama dan syekh lintas kawasan seperti Syekh Abu Al-Huda Ash-Shayyadi (Ahlul-Rafaiyah), Syekh Muhammad Dhafir Ath-Tharablusi (Ahlul-Madaniyah), serta didukung oleh tokoh jurnalis-nasionalis Mesir seperti Mustafa Kamil Pasha dan Ali Kamil.²

Sebagai alat utama untuk menyebarluaskan, Sultan menggabungkan jalur administrasi modern dengan lembaga keagamaan konvensional; inisiatif ini disebarkan secara tersembunyi melalui pembentukan kelompok cabang di wilayah Afrika Utara, pengorganisasian jaringan tarekat sufi (Shadziliyah, Qadiriyyah, dan Madaniyyah) secara struktural, serta penyebaran ajaran politik yang menentang kolonialisme kepada puluhan ribu peziarah dan jamaah haji dari Afrika Utara yang melalui kelompok cabang di Bagdad dan Mekah. Sementara untuk sarana komunikasi massa, gagasan persatuan dan seruan kontribusi finansial

dikampanyekan secara terbuka melalui media cetak internasional secara agresif, khususnya lewat surat kabar Al-Muayyid dan Al-Liwa di Mesir.

D) Kekaisaran Rusia

Penyebaran Pan-Islamisme di kawasan Asia Tengah di bawah kendali Rusia, khususnya di daerah Syr-Darya, Shymkent, dan Taraz (sekarang bagian dari Kazakhstan dan Uzbekistan), bermula dari penumpukan ketidakpuasan sosial-ekonomi masyarakat lokal setelah Pemberontakan Andijan 1898. Ketidakpuasan ini kemudian berkembang melalui jaringan spiritual Tarekat Sufi Naqshbandiyya. Gerakan ini dipimpin oleh sosok karismatik seperti Muhammad Ali Sabyr (Dukchi Ishan), yang memiliki otoritas mistis dan pengaruh teologis yang melintasi batas wilayah nomaden, memicu mitos-mitos perlawanan yang terus ada di kalangan komunitas Kazakh. Metode utama dalam penyebaran ideologi ini bukan melalui pamflet politik resmi, tetapi melalui hubungan kuat antara murid dan guru (ishan) di dalam tarekat, juga diperkuat oleh beredarnya surat-surat ajakan jihad (Ghazat)—baik yang asli maupun yang dipalsukan—yang mengklaim berasal dari pemimpin luar seperti Sultan Utsmaniyah dan Emir Afghanistan. Pola penyebaran yang berbasis pada relasi kultural dan keagamaan yang solid inilah yang pada akhirnya menciptakan kepanikan informasi di kalangan birokrasi militer kolonial Rusia yang tidak mengerti psikologi massa lokal.²

² Muh Ilham Noer Hamsah, *Analysis Of Sultan Abdul Hamid II's Pan-Islamism Policy Towards Asian And European Geopolitics In The 19th Century*, t.t.

² Soli Shahvar, "The Russo-Ottoman Struggle over the Support of the Muslims of Southern Caucasus in the 1890s," *British Journal of Middle Eastern Studies* 52, no. 1 (2025): 1–19, <https://doi.org/10.1080/13530194.2023.2223499>.

5. Tokoh dan Organisasi yang Lahir dari Pengaruh Gerakan Pan-Islamisme

Manifestasi jangka panjang dari kebijakan politik Pan-Islamisme Sultan Abdul Hamid II tidak lenyap begitu saja pasca-runtuhnya Kekaisaran Ottoman pada tahun 1924. Gagasan solidaritas universal ini bermutasi menjadi gerakan keagamaan, organisasi sosial, dan partai politik modern di berbagai belahan dunia Islam terjajah. Berikut adalah detail tokoh dan dinamika transformasi organisasi tersebut dari awal pengaruh gerakan hingga zaman sekarang:

A) Imperium Inggris

- **Tokoh Utama:** Maulana Mohammad Ali, Shaukat Ali, dan Abul Kalam Azad.[22]
- **Transformasi Organisasi:** Gerakan Khilafat **1919** lahir sebagai komite aksi masif di Asia Selatan untuk menekan Inggris agar tidak membubarkan institusi Khilafah pasca-Perang Dunia I. Ketika kekhalifahan resmi dihapus oleh Majelis Agung Nasional Turki pada tahun 1924, organisasi ini mengalami disorientasi fungsional karena kehilangan objek perjuangan utamanya. Namun, secara historis, Gerakan Khilafat tidak mati begitu saja; ia bertransformasi menjadi poros kesadaran komunal-politik (*communal consciousness*) yang menyadarkan umat Muslim India bahwa mereka memerlukan entitas politik mandiri. Di zaman sekarang, warisan ideologis gerakan ini mengkristal menjadi fondasi nasionalisme dua negara di Asia Selatan, yang melahirkan berdirinya negara berdaulat Pakistan (1947) dan Bangladesh (1971). Narasi solidaritas transnasional eks-Khilafat ini dimanfaatkan oleh elit politik modern Pakistan untuk membangun kedekatan geopolitik yang sangat erat dengan Republik Turki modern hingga hari ini.

B) Imperium Belanda

- **Tokoh Utama:** H.O.S. Tjokroaminoto, K.H. Ahmad Dahlan, dan K.H. Hasyim Asy'ari.
- **Transformasi Organisasi:** Di Hindia Belanda (Indonesia), pengaruh Pan-Islamisme diserap secara struktural oleh Sarekat Islam (SI), yang mentransformasikan diri dari serikat dagang lokal menjadi gerakan politik massa pertama yang mengadopsi corak perjuangan anti-kolonial transnasional. Sementara itu, spirit pembaruan dan jaringan ulamanya memengaruhi organisasi modernis Muhammadiyah (1912) dan tradisional Nahdlatul Ulama (NU - 1926). NU secara spesifik lahir dari rahim *Komite Hijaz*, sebuah kepanitiaan ad-hoc yang dibentuk para ulama Nusantara untuk merespons runtuhnya Ottoman dan peralihan kekuasaan di Makkah. Di zaman sekarang, ketiga organisasi ini mengalami pribumisasi (*indigenization*) politik. Sarekat Islam bertransformasi menjadi organisasi massa keagamaan kecil (Syarikat Islam), sedangkan Muhammadiyah dan NU menjelma menjadi organisasi Islam non-pemerintah terbesar di dunia. Cita-cita institusi khilafah formal masa lalu telah bertransformasi total di era modern menjadi konsep solidaritas kemanusiaan global, seperti gagasan *Fiqh Peradaban* dan *Islam Nusantara* yang diusung NU, serta *Islam Berkemajuan* oleh Muhammadiyah, yang aktif mempromosikan perdamaian dunia di forum internasional (seperti R20).

C) Imperium Prancis

- **Tokoh Utama:** Abdelhamid Ben Badis (Aljazair) dan Abdelaziz Thâalbi (Tunisia).

- **Transformasi Organisasi:** Asosiasi Ulama Muslim Aljazair (AUMA - 1931) dan Partai Destour (Tunisia) menggunakan Pan-Islamisme sebagai instrumen resistensi budaya guna membendung asimilasi total (*Francization*) yang diterapkan Prancis. AUMA bergerak mengembalikan identitas bahasa Arab dan Islam di akar rumput Aljazair melalui jaringan madrasah independen. Selama perang kemerdekaan Aljazair (1954–1962), kader-kader intelektual AUMA melebur ke dalam *Front de Libération Nationale* (FLN) sebagai motor ideologis revolusi. Di zaman sekarang, setelah Aljazair merdeka, AUMA dihidupkan kembali sebagai organisasi keagamaan kultural terpendang yang menjaga nilai-nilai konservatif negara. Di Tunisia, Partai Destour bertransformasi menjadi *Neo-Destour* di bawah Habib Bourguiba yang membawa Tunisia merdeka pada tahun 1956. Meskipun pemerintahan modern pasca-kemerdekaan di kedua negara ini sempat bergeser menjadi rezim sekuler-nasionalis, warisan gerakan Pan-Islam awal tetap membekas kuat dalam konstitusi modern mereka yang secara absolut menetapkan Islam sebagai agama resmi negara dan bahasa Arab sebagai identitas nasional utama.

D) Kekaisaran Rusia

- **Tokoh Utama:** Ismail Gasprinsky (Ismail Gaspirali) dan Munawwar Qari Abdurrahmonov.
- **Transformasi Organisasi:** Gerakan Jadidisme (Jadidism) berkembang sebagai jaringan pembaruan pendidikan Islam di Asia Tengah untuk melawan tekanan Kristenisasi dan Rusifikasi Tsar Rusia, yang secara politik mengkristal dalam

wadah Ittifaq al-Muslimin (1905) di parlemen Rusia (*Duma*). Pasca-Revolusi Bolshevik 1917, organisasi-organisasi Jadidisme sempat mencoba beradaptasi melalui gerakan "Komunisme Muslim" (tokohnya seperti Sultan Galiev) untuk mempertahankan otonomi umat, namun gerakan ini dihancurkan secara brutal melalui pembersihan massal (*Great Purge*) oleh rezim Joseph Stalin pada era Uni Soviet. Di zaman sekarang, setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, warisan intelektual Jadidisme mengalami renaissance (kebangkitan kembali). Negara-negara modern di Asia Tengah seperti Uzbekistan, Kazakhstan, dan Turkmenistan menetapkan tokoh-tokoh Jadidisme masa lalu sebagai pahlawan nasional. Konsep integrasi antara sains modern dan identitas keislaman global milik Jadidisme kini diadopsi oleh pemerintah Uzbekistan dan Kazakhstan modern untuk membangun institusi pendidikan tinggi Islam yang moderat guna menangkal radikalisme.

KESIMPULAN

Sultan Abdul Hamid II (1876–1909 M) menduduki tahta saat menghadapi krisis kompleks yang sangat memengaruhi keberadaan dan kedaulatan Kekaisaran Turki Ottoman. Di dalam negeri, ia dikelilingi oleh hutang luar negeri yang terus menggunung dari pemerintah sebelumnya, pemberontakan etnis-nasionalis yang terjadi di Balkan, serta tekanan dari kelompok oposisi sekuler Young Ottomans yang ingin membatasi kekuasaan absolut kerajaan. Di luar negeri, ancaman agresif dari kekuatan imperialis Barat—khususnya Inggris yang menguasai Mesir, Prancis di wilayah Afrika Utara, dan militer Rusia di perbatasan Kaukasus—mengancam posisi militer Ottoman

yang semakin terjepit dalam konteks Pertanyaan Timur. Dalam situasi politik domestik dan internasional yang sangat mendesak ini, Sultan Abdul Hamid II membuat keputusan yang sangat bijak, strategis, dan pintar dengan mengadopsi ide-ide Pan-Islamisme modern dari Jamaluddin al-Afghani. Alih-alih mengandalkan kekuatan militer konvensional yang kian melemah, Sultan mentransformasikan gagasan revolusioner tersebut menjadi instrumen geopolitik resmi dari atas ke bawah (*top-down*). Beliau memanfaatkan kedudukannya sebagai Khalifah untuk menggalang solidaritas universal, menjadikannya senjata asimetris atau "bom waktu" politik guna menggertak negara-negara adidaya Eropa agar tidak berani mengusik jantung kekuasaan Ottoman.

Selain mampu memperpanjang masa kedaulatan dan legitimasi Sultan Abdul Hamid II di Istanbul, Keputusan politik ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan hingga menciptakan efek domino yang luas di banyak wilayah terjajah Muslim maupun yang tidak di seluruh dunia. Ikatan loyalitas suku Arab di Hijaz dan masyarakat Kurdi di bagian timur menjadi semakin kuat melalui kebijakan ini, rasa persaudaraan Islam di dalam negeri terpupuk, sehingga berhasil menenangkan ketegangan akibat usaha disintegrasi oleh para musuh politik. Sementara itu, dampak eksternalnya meluas melampaui batas-batas geografis kekaisaran. Paham ini berhasil menyatukan emosi kolektif umat Islam lintas mazhab, ras, dan bangsa, serta membangkitkan kesadaran politik anti-kolonial dari Asia Selatan, Afrika Utara, hingga Asia Tenggara. Di wilayah-wilayah yang sedang berada di bawah cengkeraman penjajahan Barat, kampanye Pan-Islamisme berhasil memicu kepanikan luar biasa di kalangan pemerintah kolonial (seperti kekhawatiran Belanda di Hindia Belanda), karena masyarakat lokal mulai memandang diri mereka sebagai bagian dari kekuatan politik global yang dipimpin oleh

seorang Khalifah di Istanbul, bukan sekadar subjek jajahan yang lemah.

Gerakan Pan islamisme ini memiliki tantangan tersendiri dalam penyebarannya ke berbagai wilayah di seluruh dunia, Sultan Abdul Hamid II memilih untuk menempuh jalur diplomasi yang memiliki ragam variasi namun tetap terstruktur. Keputusan ini diwujudkan melalui peresmian jaringan korps konsulat resmi Ottoman di kota-kota yang memiliki letak geografis yang strategis, seperti di Bombay, Calcutta, hingga Batavia (Jakarta), yang memiliki fungsi perpanjangan tangan politik istana. Sultan juga mengirimkan utusan rahasia dan misionaris budaya ke wilayah-wilayah terjauh, termasuk Asia Tengah yang diduduki Rusia. Di samping jalur birokrasi, penyebaran dilakukan melalui pengorganisasian aliran tasawuf (seperti tarekat Sanusiyah di Libya), pembiayaan media massa pro-Ottoman, serta optimalisasi musim ibadah haji di Makkah sebagai pusat indoktrinasi ideologis bagi para ulama internasional. Selain itu, manifestasi fisik terbesar dari strategi ini ditunjukkan lewat pembangunan proyek infrastruktur rahasia berupa Jalur Kereta Api Hijaz (*Hejaz Railway*) yang menghubungkan Damaskus ke Madinah sebagai simbol kemandirian dan persatuan Islam global.

Walaupun terlihat hanya sebagai kebijakan formal sebagai suatu lembaga pemerintahan dan kekhalifahan yang akhirnya runtuh pada tahun 1924, kebijakan politik pan-islamisme ini tidak hanya berdampak dalam beberapa dekade saja, namun menjelma abadi menjadi warisan tradisi historis yang sangat besar bagi umat Islam dunia yang pengaruhnya masih dapat dirasakan hingga era kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa benih solidaritas universal ini berhasil berevolusi menjadi penggerak lahirnya organisasi-organisasi modern di wilayah yang bernasib sama sebagai tanah jajahan. Jejak pengaruh tersebut bertransformasi secara historis

melahirkan fondasi nasionalisme Muslim di Asia Selatan (melalui Gerakan Khilafat yang melahirkan negara Pakistan dan Bangladesh), menyulut revolusi budaya menentang asimilasi Prancis (melalui Asosiasi Ulama Muslim Aljazair dan Partai Destour di Tunisia), memicu gerakan modernisasi pendidikan di Asia Tengah (melalui Jadidisme dan partai Ittifaq al-Muslimin). Di Indonesia, warisan gerakan ini terserap kuat dalam genealogi pergerakan nasional awal seperti Sarekat Islam, serta memengaruhi corak perjuangan organisasi Islam terbesar di dunia saat ini, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Di zaman sekarang, memori kolektif Pan-Islamisme tidak lagi mewujud dalam tuntutan institusi politik khilafah formal yang usang, melainkan telah bertransformasi secara matang menjadi konsep kerja sama internasional, diplomasi kemanusiaan global, serta promosi perdamaian dunia yang digerakkan oleh lembaga-lembaga Islam modern di panggung internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah, A., Faiz, M., & Masruri, M. (2024). Strategi politik Pan-Islamisme Sultan Abdul Hamid II (1876–1909 M). *Advances in Humanities and Contemporary Studies*, 5(2), 162–170. <https://doi.org/10.30880/ahcs.2024.05.02.017>
- Alizar, M., & Muhammadi, Q. (2019). Islamic sharia and non-Muslim citizens in Kanunname during Sultan Abdul Hamid II of the Ottoman Empire. *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 27(1), 37–68. <https://doi.org/10.21580/ws.27.1.3543>
- Ansari, K. H. (1986). Pan-Islam and the making of the early Indian Muslim socialists. *Modern Asian Studies*, 20(3), 509–537. <https://doi.org/10.1017/S0026749X00007848>
- Bistara, R. (2021). Teologi modern dan Pan-Islamisme: Menilik gagasan pembaharuan Islam Jamaluddin al-Afghani. *FiTUA: Jurnal Studi Islam*, 2(1), 67–80. <https://doi.org/10.47625/fitua.v2i1.290>
- Hamsah, M. I. N., M, M. D., & Mastanning. (2023). Analysis of Sultan Abdul Hamid II's Pan-Islamism policy towards Asian and European geopolitics in the 19th century. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), 4781–4800. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5430>
- Hidayat, F., & Rohman, M. (2024). Modernisasi pendidikan Islam di Minangkabau: Studi tentang interaksi dengan Pan-Islamisme (1909–1945). *At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam*, 9(2), 169–186. <https://doi.org/10.22515/attarbawi.v9i2.10955>
- Kurniawan, A. S., & Hadi, N. (2022). Pengaruh Pan-Islamisme bagi kekhalifahan Turki Utsmani pada masa Sultan Abdul Hamid II. *Tanjak: Sejarah dan Peradaban Islam*, 2(2), 181–204. <https://doi.org/10.19109/tanjak.v2i2.12864>
- Prayogi, A. (2023). Pan-Islamism and response to the collapse of Ottoman Turks in the Dutch East Indies. *Paramita: Historical Studies Journal*, 33(1), 76–85. <https://doi.org/10.15294/paramita.v33i1.36343>
- Rahmawati, R. K. (2017). Studi historis kebijakan luar negeri Sultan Abdul Hamid II di Daulah ‘Utsmaniyah (1876–1909 M). *JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, 1(1), 193–211. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/juspi/article/view/1006>

- Ravico, R., Rochmiatun, E., Sustianingsih, I. M., Susetyo, B., & Ramadhona, N. (2023). Implementasi heuristik dalam penelitian sejarah bagi mahasiswa. *Chronologia*, 4(3), 118–128.
<https://doi.org/10.22236/jhe.v4i3.11089>
- Rhamadani, A., & Triaristina, A. (2023). Peran Taman Siswa dalam pembentukan rasa nasionalisme pada masa pergerakan nasional. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah*, 19(1).
<https://doi.org/10.21831/istoria.v19i1.53750>
- Saputra, A. (2018). Pan-Islamisme dan kebangkitan Islam: Refleksi filsafat sosial-politik Jamaluddin al-Afghani. *Akademika: Jurnal Keagamaan dan Pendidikan*, 14(2), 68–84.
<https://ejournal.kampusmelayu.ac.id/index.php/akademika/article/view/53>
- Shahvar, S. (2025). The Russo-Ottoman struggle over the support of the Muslims of Southern Caucasus in the 1890s. *British Journal of Middle Eastern Studies*, 52(1), 1–19.
<https://doi.org/10.1080/13530194.2023.2223499>
- Sirait, A. M. (2020). Jamaluddin al-Afghani dan karir politiknya. *Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 10(2), 167–182.
<https://doi.org/10.33367/ji.v10i2.1291>
- Wahab, F., & Zainuddin. (2022). Pemikiran dan gerakan pembaharuan politik Islam Jamaluddin Al Afghani. *Jurnal Pusaka: Media Kajian dan Pemikiran Islam*, 12(1), 51–64.
<https://doi.org/10.35897/ps.v12i1.866>